

”POLITIK AKOMODASI ISLAM”

Jika sebelumnya, hubungan Islam dan negara Orde Baru penuh dengan ketegangan dan pertentangan, maka sejak tahun 80-an awal, tercapai suatu model hubungan baru di mana masing-masing pihak “tampak” bisa menerima kehadiran yang lain secara damai. Islam sebelumnya selalu dicurigai sebagai salah satu kekuatan masyarakat yang belum bisa diserap secara penuh ke dalam “komunitas nasional” itu, salah satunya karena dianggap masih memiliki agenda “eksklusif” yang bertentangan dengan “format negara bangsa”, maka setelah penerimaan asas tunggal, Islam dipandang telah bisa “berdamai”. Bahkan sebagian pemikir Islam mendudukan Islam sebagai “ideologi komplementer”, bukan alternatif, terhadap Pancasila. Artinya, jika sebelumnya Islam dipandang oleh umatnya sebagai “cara hidup” (way of life) yang utuh, mencakup dan total, maka sekarang ia dipandang tak lebih sebagai satu varian saja dari sekian “cara hidup” yang ada dalam masyarakat. Di atas itu semua, Pancasila diterima sebagai “atap bersama” (common denominator) yang menghimpun semua kelompok di negeri ini. Oleh sejumlah pengamat politik, ini digambarkan sebagai “politik akomodasi Islam”: yakni penerimaan Islam sebagai bagian yang “sah” dari “komunitas nasional”.

Politik akomodasionisme ini sebenarnya mengandung banyak soal. Pertama, di dalam ummat Islam sendiri terdapat suatu kompleksitas yang rumit karena adanya keragaman yang tinggi di tingkat “tafsir” keagamaan, orientasi, latar belakang kultur serta perbedaan dalam merumuskan kepentingan. Oleh karenanya, berbicara mengenai Islam, mesti diberi kualifikasi. Jika di sini dikatakan bahwa Islam telah melakukan rekonsiliasi negara Orde Baru, maka yang dimaksudkan adalah elemen tertentu dari ummat Islam, bukan keseluruhannya. Meski dalam wacana “resmi” Islam sekarang ditampilkan sebagai telah melakukan rekonsiliasi serta menempuh politik akomodasi namun ternyata wacana “tak resmi” masih kuat “dipeluk” oleh elemen ummat yang lain. Dan celakanya wacana resmi ternyata acapkali tidak toleran terhadap wacana yang lain.

Kedua, orientasi perjuangan “struktural-simbolistik” menjadi kelewat besar sehingga yang “kultural-substantif” terabaikan.

Ketiga, Islam tidak lagi bersikap kritis terhadap negara Orde Baru. Ada kesan kuat, bahwa Islam justru mengambil posisi pengesah dan berseberangan dengan gerakan-gerakan yang menghendaki perubahan sistem di negeri ini ke arah yang lebih “Islami” dan demokratis. Agenda “khusus Islam” seperti terpisah dari agenda demokratisasi.

Untuk menjawab soal-soal ini, Polemik mengetengahkan perbincangan redaktur tashwirul Afkar M. Imdadun Rahmat dengan tiga tokoh yang diandaikan mewakili perspektif yang berbeda; **Fachry Ali, MA., KH. Yusuf Muhammad** dan **Prof. Soetandyo Wignyosoebroto**.

Selamat Mengikuti.